



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B. Curug, Kota Serang - Provinsi Banten

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 555/ 161 -DKISP.PPID/2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa Informasi dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

6. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Mencabut Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten Nomor 555/272. DKISP-PPID/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini

Ditetapkan di : Serang,

Pada tanggal : 24 Juli 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI



ARIF AGUSRAKHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID;
2. PPID Pelaksana OPD Se-Provinsi Banten.

Lampiran I Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten

Nomor : 555/161 - DKISP.PPID/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN 2025**

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
1	Akses Ruang Server	Ruang Server	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j; UU 11/2008 ttg ITE Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data.	Menjaga/melindungi hak akses.	25 Tahun
2	Arsip Statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	Dokumen Arsip Dinamis Bappeda Provinsi Banten	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i; UU 43/2009 ttg Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i	Mengganggu/Menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena pengungkapan rahasia.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	5 Tahun
3	Berita Acara Pemeriksaan Hukdis PNS	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi hak privasi.	1 Tahun
4	Berita Acara Penilaian Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan laporan yang masih dalam proses pembahasan.	Dapat menimbulkan konflik atau permasalahan.	1 Tahun
5	Biodata elektronik dan Non Elektronik ASN (database)	Data Pegawai Bappeda Provinsi Banten	UU 14/2008 ttg KIP (Ps 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Terbuka untuk data administrasi, <b>kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin</b>

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
6	Biodata Tenaga Kerja Asing	Kartu Tenaga Kerja, Daftar Riwayat Kerja	UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan; Permenaker No. 02/MEN/III/2008	Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan rahasia individu.	Memberikan perlindungan terhadap TKA.	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan <b>persetujuan tertulis</b>
7	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Nilai kinerja individu (angka/skor capaian), Catatan perilaku kerja, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan.	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.	Dibuka setelah mendapatkan <b>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.</b>
8	Daftar riwayat hidup	Daftar Riwayat Hidup (DRH), (Nomor Rekening pegawai)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 43/1999 ttg Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai.	Menjaga rahasia pribadi pegawai.	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan <b>persetujuan tertulis</b>
9	Data hasil Medical Check Up (MCU) Peserta Seleksi Calon Anggota PASKIBRAKA	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi; Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
10	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Data rencana penempatan CPNS/PNS	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	10 Tahun
11	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan SPP,SPM,SP2D	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j; UU Perbankan	Informasi terkait dengan identitas rekening orang.	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	10 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
12	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan	Identitas pelapor, Isi lengkap laporan pengaduan yang bersifat pribadi/sensitif, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.	Dibuka setelah mendapatkan <b>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.</b>
13	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Nama pegawai, nomor rekening, besaran gaji/tunjangan rinci per individu, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.	Dibuka setelah mendapatkan <b>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.</b>
14	Data pribadi klien bantuan hukum	Data pribadi klien bantuan hukum	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan asas praduga tak bersalah).	Melindungi hak privasi.	10 tahun setelah orang yang bersangkutan meninggal
15	Data Pribadi PNS	KTP, Nomor Rekening, Identitas Kepegawaian, Dokumen pribadi lainnya	UU 27/2022 ttg PDP Pasal 4; UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h	Merugikan PNS, membahayakan keselamatan dan keamanan PNS.	Data pribadi merupakan privasi yang tidak dapat diakses oleh sembarangan orang.	10 tahun setelah orang yang bersangkutan meninggal

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
16	Data Rencana Awal Penjualan atau Pembelian Tanah atau Properti di Sektor Pariwisata	Profil Investasi Bisnis	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5	Mengungkap data rahasia perusahaan yang apabila dibuka akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi data rahasia perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat.	2 Tahun
17	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Data rencana penempatan CPNS/PNS	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.	Mencegah Kolusi.	1 Tahun
18	Data usulan Promosi dan Mutasi PNS	Dokumen/Notulen/Risalah hasil rapat	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; UU 43/1999 ttg Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan prematur.	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja.	10 Tahun
19	Data/Dokumen/Arsip yang mengungkapkan Informasi Pribadi	Data Kepegawaian, Data Pribadi Pelaku Usaha, Anggota PASKIBRAKA, dll.	UU Kepegawaian; UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf a, h, i, j	Mengungkapkan data pribadi; Melanggar HAM. Dapat Disalahgunakan.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan <b>persetujuan tertulis</b>
20	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Rincian hasil evaluasi/asesmen personal, Uraian pelanggaran/kelemahan kinerja individu, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.	Dibuka setelah mendapatkan <b>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.</b>

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
21	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin	Uraian pelanggaran secara rinci, Laporan hasil pemeriksaan yang belum final.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi; Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.	Dibuka setelah mendapatkan <b>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.</b>
22	Dokumen Kelengkapan Rapat Pimpinan yang sifatnya rahasia	Notula Rapat Rahasia/konfidensial Pimpinan Daerah	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	(Membahayakan keamanan)	Melindungi informasi rahasia; Membahayakan keamanan dan dapat disalahgunakan pihak tertentu.	2 Tahun
23	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rahasia	Isi pembahasan strategi, kebijakan, atau keputusan yang belum final, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Terungkapnya notulen rapat yang sifatnya dirahasiakan.	Melindungi dokumen notulen rapat yang sifatnya dirahasiakan.	2 Tahun
24	Dokumen pembahasan Rencana Kebijakan Pariwisata/ Notulensi dan Draft	Notulen Rapat Pimpinan, Draft Rancangan Strategis Kebijakan Pariwisata	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i	Menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan.	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.	2 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
25	Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi; Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia.	10 Tahun
26	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Identitas pegawai dalam SKP, Catatan/komentar pejabat penilai dalam SKP, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan.	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.	Dibuka setelah mendapatkan <b>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.</b>
27	Dokumen SPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebelum di audit	Rincian SPJ dari desa yang sedang diaudit, Lampiran kuitansi, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Dapat mengganggu proses pemeriksaan SPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.	Dapat melindungi proses pemeriksaan SPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.	1 Tahun sampai setelah selesai di audit
28	Dokumentasi Rapat Terbatas Pimpinan	Video/Rekaman Suara Dokumentasi Rapat Terbatas Pimpinan Daerah	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf i	(Mengganggu penetapan kebijakan)	Melindungi kerahasiaan Informasi/Bahan Kebijakan Pimpinan karena bersifat belum final.	2 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
29	Hasil Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Test Report	Pedoman Pelaksanaan Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh KAN	Akan dapat menimbulkan persaingan usaha yang dikhawatirkan tidak sehat (saling menjatuhkan).	Memberikan ketenangan dan keamanan bagi kustomer yang melakukan pengujian.	5 Tahun
30	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan i; Peraturan Menpan ttg Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain.	Dapat mengandung informasi rahasia institusi/merugikan institusi.	1 Tahun
31	Identitas PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai Bappeda Provinsi Banten	UU 14/2008 ttg KIP (Ps 17 huruf H)	Informasi yang berkaitan dengan hal pribadi.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Terbuka sepanjang PNS memberikan <b>persetujuan tertulis</b>
32	Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan	Laporan Data Pegawai Bappeda Provinsi Banten	-	-	Rahasia.	Memberikan <b>ijin tertulis</b>
33	Informasi Arsip yang Belum Dapat Diakses karena Retensi Waktu	Arsip negara yang masih dalam masa retensi, Dokumen perjanjian internasional yang masih dalam tahap negosiasi, dll.	-	Mengganggu proses administratif dan kebijakan; Informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan publik.	Melindungi arsip dan rentan disalahgunakan.	25 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
34	Informasi pengadaan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang masih berjalan	UU 14/2008 ttg KIP; UU 17/2003 ttg Keuangan Negara, dll.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara.	Melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara.	1 Tahun
35	Informasi terkait pemberian hak akses sistem informasi dan komunikasi	Pengadaan barang dan jasa, Perencanaan, Realisasi keuangan, dll.	Peraturan BSSN No. 10/2019; UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf C dan J; UU ITE	Dapat mengakses informasi dan melakukan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menutup akses informasi terhadap kerentanan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik.	5 Tahun
36	Informasi yang Bersifat Rahasia Pribadi	Data kependudukan, Data keuangan pribadi	UU 43/2009 ttg Kearsipan; UU 14/2008 ttg KIP	Melanggar hak privasi individu; Penyalahgunaan informasi pribadi.	Melindungi informasi yang bersifat rahasia pribadi.	10 tahun setelah orang yang bersangkutan meninggal
37	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi Badan Penghubung	Data Pribadi Pegawai, Data Pribadi Penyewa Ruang Rapat/kamar Wisma Banten	UU Kepegawaian; UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf a, h, i, j	Mengungkapkan data pribadi; Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	10 Tahun setelah yang bersangkutan meninggal
38	Internet Protocol (IP) Address	Internet Protocol (IP) Address	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j; UU 11/2008 ttg ITE Pasal 30	Penerobosan/ penyalahgunaan akses.	Keamanan Sistem/Jaringan.	25 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
39	IP Private Perangkat Jaringan	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU 1/2024 ttg Perubahan UU ITE Pasal 18 (1)	Membuat tidak kondusif, berpotensi diserang oleh <i>hacker</i> .	Untuk menjaga keamanan sistem, terhindar dari potensi kebocoran data.	5 tahun
40	Jammer	Dokumen persandian daerah	UU 14/2008 ttg KIP	Membuat tidak kondusif kondisi pemerintahan dan mengganggu kelancaran komunikasi pimpinan.	Bersifat privasi dan rahasia; alat mematikan sinyal <i>gadget</i> agar pihak yang mengikuti agenda pimpinan fokus.	5 tahun
41	Keamanan Sistem	Dokumen keamanan sistem informasi	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf f dan c	Membuat tidak kondusif, rentan kebocoran data, akan disalahgunakan.	Menjaga kondusifitas dan memperkuat kestabilan keamanan sistem informasi pemerintahan.	5 tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
42	Kode akses elektronik	-	UU 11/2008 ttg ITE Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.	25 Tahun
43	Kontra Penginderaan	Dokumen persandian daerah	Peraturan BSSN No. 10/2019	Membahayakan kepala daerah; Membuat tidak kondusif kondisi pemerintahan.	Untuk mendeteksi kebocoran dan sterilisasi ruang pimpinan dari penyadap.	5 tahun
44	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Laporan hasil Pemeriksaan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan i; Peraturan Menpan ttg Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi.	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi.	1 Tahun
45	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Seluruh isi laporan keuangan sebelum audit resmi, dll.	UU 14/2008 ttg KIP; UU 17/2003 ttg Keuangan Negara, dll.	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan.	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan.	1 Tahun sampai setelah selesai di audit
46	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf h; UU ITE	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	5 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
47	Laporan Penanganan Konflik	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf c dan i; UU 17/2011 ttg Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen.	25 tahun
48	Laporan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf a nomor 3, huruf c.	Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; Membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara.	25 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
49	Laporan Rapat Kominda	-	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf c dan i; UU 17/2011 ttg Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen.	25 Tahun
50	Laporan Rapat Pimpinan yang bersifat rahasia	Notulensi Rapat	UU 14/2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan polemik/kebijakan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan.	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.	Sampai penetapan kebijakan
51	Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga	Surat Penawaran	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf b & h angka 3	Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	1 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
52	Password Akun Email Perangkat Daerah	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU 1/2024 ttg Perubahan UU ITE Pasal 18 (1)	Terjadi kebocoran data dan dokumen, terjadi penyerangan dari <i>hacker</i> .	Password merupakan hak akses yang tidak dapat dibagi pakai, menghindari potensi pencurian data.	5 tahun
53	Password Satu Login	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU 27/2022 ttg PDP Pasal 4	Berpotensi disalahgunakan, mudah diserang <i>hacker</i> , berpotensi terjadi penyerangan perangkat lunak dan kebocoran data.	Password merupakan hak akses yang tidak dapat dibagi pakai, untuk menjaga keamanan akses dan kondusifitas.	5 tahun
54	Proposal penelitian	Metodologi penelitian yang inovatif dan belum dipublikasikan, dll.	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan selesai

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
55	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	Lembar pengajuan/usulan peserta HAKI	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf b	Dapat kepentingan HAKI (merugikan kepentingan HAKI).	Memberikan perlindungan HAKI.	5 Tahun
56	Rekam Medik/hasil <i>check up</i> perorangan PNS/Pejabat	Hasil Relkam Medis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; UU 36/2009 ttg Kesehatan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	10 tahun setelah orang yang bersangkutan meninggal
57	Rencana Operasi Pengawasan Angkutan Barang dan Penumpang	Data Informasi Operasi Pengawasan Angkutan Barang dan Penumpang	UU 14/2008 ttg KIP; UU 22/2009 ttg LLAJ	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan
58	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai Bappeda Provinsi Banten	UU 14/2008 ttg KIP (Ps 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS rahasia; Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu memberikan <b>persetujuan tertulis</b>
59	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan Barang/Jasa yang sedang berproses	-	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf b, I dan J; UU 30/2000 ttg Rahasia Dagang Pasal 3 & 4	Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	1 Tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
60	Soal Tes CPNS	Soal Tes CPNS	UU 14/2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan.	Mencegah KKN.	1 Tahun
61	Source Code Aplikasi	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU 1/2024 ttg Perubahan UU ITE Pasal 18 (1)	Kebocoran data rahasia bisnis (Pemerintahan), pencurian data, terjadi <i>error</i> sistem.	Mencegah persaingan tidak sehat, perlindungan rahasia bisnis, melindungi HAKI, memperkuat keamanan siber.	5 tahun
62	SPJ Kegiatan	Data Pribadi, Nomor Rekening, Kwitansi, dll.	UU 27/2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	-	Ditutup sebagian (melindungi data pribadi).	10 Tahun
63	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Nota dinas/Disposisi (hasil dari disposisi pimpinan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	25 Tahun
64	Topologi Jaringan	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU 1/2024 ttg Perubahan UU ITE Pasal 18 (1)	Kebocoran informasi, berpotensi terjadi penyerangan, lemahnya keamanan sistem.	Melindungi informasi sensitif, mencegah serangan.	5 tahun

No.	Informasi	Nama Dokumen / Rincian	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
				Jika Dibuka	Jika Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
65	Topologi Server	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU 1/2024 ttg Perubahan UU ITE Pasal 18 (1)	Berpotensi terjadi kebocoran data, mudahnya diakses oleh pihak tidak berkepentingan, berpotensi terjadi penyerangan.	Keamanan data, menghindari akses yang tidak sah.	5 tahun